

**PERANAN RETRIBUSI PASAR DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)****Ruliyanto Syahrain****Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun****(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)****Abstract**

This study aims to examine the role of market levies and population on increasing local own-source revenue (PAD). This study uses secondary data from the regional revenue service (Dispenda) and the central statistical agency (BPS) data collected includes data on market levies, population numbers and the level of local revenue. The analytical method uses the multiple linear regression equation model. The results of this study amounted to one variable that had a positive effect on the increase in population. As for those who did not have a significant effect on the increase in local revenue, namely market fees.

Keywords: Market Retribution, Number of Population, Increased Local Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peranan retribusi pasar dan jumlah penduduk terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dinas pendapatan daerah (Dispenda) dan badan pusat statistik (BPS) data yang dikumpulkan meliputi data retribusi pasar, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan asli daerah. Metode analisis menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini berjumlah satu variabel yang berpengaruh positif terhadap peningkatan yaitu jumlah penduduk. Adapun yang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yaitu retribusi pasar.

Kata kunci : Retribusi Pasar, Jumlah Penduduk, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

Setiap daerah otonomi diberikan kewenangan mengatur kebijakan fiskal di daerah pemerintahannya masing-masing sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan, dan lain-lain. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal perlu menggali sumber-sumber keuangan mandiri seperti retribusi pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah

adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan. Seperti kita ketahui Kabupaten/Kota Ternate merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang cepat di Provinsi Maluku Utara, sehingga PAD dari Kota Ternate lumayan banyak bila dilihat dari letak geografis dari Kota Ternate itu sendiri.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan

masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk

mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa pembangunan ruko sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi kota, belum dilengkapi dengan kajian yang komprehensif mengenai standar penentuan nilai sewa ruko. Mengingat fungsi barang publik adalah sebagai fungsi sosial dan ekonomis, maka dalam menentukan tarif sewa ruko milik Pemerintah Kota Ternate harus sesuai dengan peran barang publik yang tidak hanya untuk mencapai profit yang tinggi, tetapi membutuhkan peran pemerintah dalam pengendalian harga sewa. Apabila barang publik sewanya mahal atau di atas nilai pasar (*over value*), maka akan berdampak pada inflasi di daerah tersebut, akan tetapi jika harga sewanya murah atau di bawah nilai pasar (*under value*), pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Ternate akan kehilangan kesempatan dalam mengoptimalkan PAD yang seharusnya diperoleh melalui sewa ruko tersebut.

Pernyataan ini sesuai dengan konsep multi term expenditure framework (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi

(dalam Halim dan Abdullah, 2006) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang.

Hubungan antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang lumayan banyak. Dengan demikian diharapkan dari pemasukan tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan maju serta target yang direncanakan tersebut pun mampu tercapai. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi retribusi Pasar, uang yang diraih digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan berguna bagi seluruh masyarakat di Kota Ternate. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam konteks hubungan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah di suatu provinsi yang cukup laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi akan mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Kota Ternate akan selalu mengkaitkan antara

kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap daerah, dengan demikian tiap daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Hasil penelitian I ketut (2013) menunjukkan bahwa retribusi pasar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sedangkan hasil penelitian Susanti (2012) menyimpulkan bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian Makdalena (2015) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Dea oktari (2014) dengan hasil Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian-penelitian peranan retribusi pasar dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menunjukan hasil yang belum konsisten. Maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Soejoto (2014), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah yang

ditunjuk, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan tempat atau daerah Kabupaten sidoarjo sedangkan penelitian ini menggunakan daerah Kota Ternate. Perbedaan lain terletak pada periode tahun yang dipakai. Pada penelitian dahulu menggunakan periode 2007-2014 sedangkan untuk penelitian ini menggunakan periode 2007–2016.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengaruh jumlah penduduk Terhadap PAD

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi jumlah penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, berarti semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi, sehingga dapat menambah pendapatan perkapita daerah tersebut. Secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya, sehingga terdapat kelebihan yang bisa ditabung untuk menjadi sumber devisa dana investasi.

Pertumbuhan penduduk dan partumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu perkem-

bangun perekonomian. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi domestiknya lebih besar. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Bhaskara dan Bagus, 2014).

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah pada daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Karena tingkat pendapatan asli daerah dapat menentukan pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah. Waktu pengamatan untuk melakukan penelitian ini selama periode september 2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi di peroleh dari pihak kedua (Barika, 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS) data yang dikumpulkan adalah meliputi data retribusi pasar, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan asli daerah. Jangka waktu yang digunakan adalah tahun 2007 sampai dengan 2016.

Untuk menguji hipotesa yakni ingin mengetahui pengaruh retribusi pasar, jumlah penduduk terhadap tingkat pendapatan asli daerah, digunakan model persamaan regresi

linier berganda sebagai berikut (Gujarati, 1995):

$$sY = f(X_1, X_2, \dots)$$

Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} e^{X_3 \beta_3 + \mu}$$

Dari fungsi tersebut dispesifikasikan menjadi bentuk model:

$$\text{PAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{RP} + \beta_2 \text{JP} + \varepsilon_i$$

Di mana:

PAD : Tingkat Pendapatan Asli Daerah

RP : Retribusi Pasar

JP : Jumlah Penduduk

β_0 : Konstanta / Intersep

ε_i : Kesalahan Pengganggu

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji Kriteria Ekonometri

Pengujian dengan kriteria ini membantu dalam menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti: ketidakbiasan (*unbiasedness*), konsistensi (*consistency*), kecukupan (*sufficiency*), dan sebagainya. Oleh karena, koefisien estimasi regresi yang diperoleh akan merupakan estimator linier terbaik dan tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator* = BLUE) apabila memenuhi beberapa asumsi yang terkenal dengan asumsi klasik. Dalam kenyataan

penelitian, sering ditemui adanya penyimpangan asumsi klasik, sehingga perlu diadakan suatu pengujian untuk mengetahui sejauh mana asumsi klasik terpenuhi (Ghozali, Imam : 2009).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering disebut juga korelasi serial, misalnya data pertama berkorelasi dengan data kedua, data kedua berkorelasi dengan data ketiga dan selanjutnya. Uji autokorelasi dapat melakukan pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $DW > \text{batas atas (dU)}$ maka tidak ada autokorelasi
- Jika $DW < \text{batas bawah (dL)}$ maka terjadi autokorelasi
- Jika $dL < DW < dU$, tidak dapat diketahui terjadi autokorelasi atau tidak

Uji Multikolinearitas

Menurut (Imam Ghozali : 2009) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 dalam hasil estimasi regresi tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Selain itu jika dilihat dari matriks korelasi antar variabel-variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen, independen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut (Ghozali, 2009) ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

- b. Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik scatterplot. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan apabila berbeda maka terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

UJI KRITERIA STATISTIK

Pengujian Koefisien secara Individual (t-test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap independent variable berpengaruh secara signifikansi terhadap dependent variable pada tingkat derajat keyakinan tertentu. Hipotesis yang digunakan adalah :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Menentukan derajat keyakinan 95% (Df = 0,05), degree of freedom (Df) = $n-k-1$, maka t-Tabel dapat dicari dan digunakan sebagai pencerminan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis. Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Di mana:

b_i = koefisien regresi variabel bebas i .

Sb_i = standart error dari koefisien regresi b_i

Selanjutnya nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-Tabel dengan kriteria :

- H_0 diterima, jika $t\text{-hitung} < t\text{-Tabel}$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
- H_a diterima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-Tabel}$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Pengujian Koefisien secara Simultan (F-test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua independent variable berpengaruh secara serempak terhadap dependent variabel pada tingkat derajat kepercayaan tertentu. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$), degree of freedom (Df)= $k/(n - k - 1)$, maka F-Tabel dapat dicari dan digunakan sebagai pencerminan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis. Nilai F-hitung dicari dengan rumus:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Di mana:

R^2 = Explained Sum Squares(ESS)

$1-R^2$ = Residual Sum Squares (RSS)

k = derajat kebebasan (Df) pembilang
 $n-k-1$

Selanjutnya nilai F-hitung dibandingkan dengan nilai F-Tabel dengan kriteria :

- H_0 diterima, jika $F\text{-hitung} < F\text{-Tabel}$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara serempak dari semua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
- H_a diterima, jika $F\text{-hitung} > F\text{-Tabel}$, berarti ada pengaruh yang signifikan secara serempak dari semua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Berdasarkan perhitungan yang dibantu dengan software SPSS versi 20, maka diperoleh hasil pengujian analisis regresi linier berganda seperti terlihat pada tabel 2 di atas dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0.05).

Dari data ini diperoleh persamaan regresi untuk penelitian sebagai berikut:

$$AD = 147.945646874,632 + 0,207 \text{ Ret.Pasar} + 12.328,769 \text{ Jmlh.Pddk}$$

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka selanjutnya akan dapat disajikan hasil pengujian regresi yakni:

α_0 = Nilai konstanta -147.945646874,632 mengandung arti jika Ret. Pasar dan Jumlah Penduduk tidak ada maka pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang sebesar -147.945646874,632%.

α_1 Ret.Pasar = variabel retribusi pasar mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,207. Jika diasumsikan pada saat pendapatan retribusi pasar naik maka jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat jumlah pendapatan retribusi pasar menurun maka jumlah pendapatan asli daerah (PAD) juga turun. Kenaikan retribusi pasar (Ret.Pasar) sebesar Rp.1 akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 0,207 dan sebaliknya.

α_2 Jml.Pddk = variabel jumlah penduduk mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 912.328,769 Jiwa. Jika diasumsikan pada saat jumlah penduduk meningkat maka jumlah penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat jumlah penduduk menurun maka pendapatan asli daerah (PAD) juga turun. Kenaikan jumlah penduduk (Jml.Pddk) sebesar 1 jiwa akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar. 912.328,769 Jiwa dan sebaliknya.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa retribusi pasar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Ternate. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan retribusi pasar tidak akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kota Ternate. dilihat dari nilai t_{Hitung} (0,834) < t tabel (2,305) dan memiliki nilai probabilitas 0,4322 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PAD) pada Alpha 5% atau dengan kata lain, retribusi pasar tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah jadi pada taraf keyakinan 95% . Sama halnya dengan tidak ada pengaruh variabel.

4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Ternate. dilihat dari nilai t_{hitung} (2,620) > t_{tabel} (2,305) dan memiliki nilai probabilitas 0,034 < 0,05.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PAD) pada alpha 5% atau dengan kata lain. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di kota Ternate

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : (1) Bahwa retribusi pasar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Ternate. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan retribusi pasar tidak akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kota Ternate. (2) Bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ternate. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Halim, A. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2, No. 2.
- Barika. 2013. *Effect of Economic Growth, Goverment Spending, Unemployment and Inflation On The Level of Poverty In Sumatra Province*. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Vol.05,No.01. Universitas Bengkulu
- Fauzan, M. 2006, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta. (2014) "*Analisis Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*".

- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadryan Putra 2010. *Menurut Sunarto 2005. retribusi pasar adalah* pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Hutabarat, S., P. Soedarsono., I Cahyaningtyas. 2013. Studi Analisa Plakton untuk Menentukan Tingkat Pencemaran di muara Sungai Babon Semarang 2 (3): 74- 84.
- Haritz, Benyamin. 1995. Peran Administrasi Pemerintah daerah: *Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat*, Prisma, Majalah Kajian Ekonomi dan Ilmu Sosial, No. 4, 81-95.
- Josof Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia : Indetifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan otonomi Daerah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Mcmaster, James. 1991. "Urban Financial Management A Training Manual". The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A, p.23
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, cetakan pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Population Reference Bureau (PRB) (2011). *World Population Data Sheet*. USA.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Soeoto, Ady . *Pengaruh Hasil Belajar Mata Pelajaran Kewirasahaan dan lingkungan Keluarga Terhadap Mminat Berwirahusaha Siswa SMK Gema 45 Surabaya*. [Http://www.Scribd.com/doc/1614478779/Untitled#download](http://www.Scribd.com/doc/1614478779/Untitled#download). Diakses 20 Mei 2014
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. AMUS: Yogyakarta
- Simanjuntak, Payaman, J. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.